

Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Norhaedah K¹, Muhammad Nadhar^{2✉}, Feri Fadli³

^{1,2,3}Administrasi Bisnis, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Untuk mengetahui peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto. 2) Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa; 1) Dinas Koperasi telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan UMKM dengan cukup baik. Kesimpulan tersebut dilandasi hasil penelitian yang mengacu pada enam indikator diantaranya indikator bantuan permodalan, indikator pengembangan SDM, dan indikator memberikan perizinan. 2) Faktor internal yang dihadapi dalam pengembangan UMKM adalah permodalan, faktor dukungan ketersediaan SDM, faktor lemahnya jaringan dan kemampuan penetrasi pasar. Sedangkan faktor eksternal yang dihadapi dalam pengembangan UMKM adalah iklim usaha yang sepenuhnya belum kondusif, keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya akses pasar dan keterbatasan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Abstract

This research aims to; 1) To find out the role of empowerment of the Cooperatives and UMKM Service in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises in Bulu-Bulu Village, Jeneponto Regency. 2) To find out the internal and external factors of the empowerment of the Cooperatives and UMKM Service in developing micro, small and medium enterprises in Bulu-Bulu Village, Jeneponto Regency. The type of research used is qualitative research with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction technique, data display, and conclusion drawing.

The results of the study explain that; 1) The Cooperative Service has performed its role in empowering MSMEs quite well. The conclusion is based on the results of research that refers to six indicators including indicators of capital assistance, indicators of human resource development, and indicators of granting permits. 2) The internal factors faced in the development of MSMEs are capital, the support factor for the availability of human resources, the weakness of the network and the ability to penetrate the market. Meanwhile, the external factors faced in the development of MSMEs are a business climate that is not fully conducive, limited facilities and infrastructure, limited market access and limited human resources.

Keywords: Empowerment; Development of Micro, Small and Medium Enterprises

✉ Corresponding author :

Email Address : muhammad_nadhar@yahoo.com

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh penempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wilantara & Susilawati (2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan kontribusi yang cukup besar yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Keberadaan usaha kecil tidak dapat di pisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional, karena usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi.

Dorongan terhadap pengembangan dan pemberdayaan pemerintahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat gencar dilakukan bahkan bisa disebut paling gencar sejak reformasi. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini mendukung pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Kredit Usaha Rakyat yang target utamanya adalah pelaku usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang layak usaha, namun belum memiliki modal yang memadai. KUR sebagai program juga menjadi bagian dari proses pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dari hasil program yang dikeluarkan pemerintah, maka perkembangan usaha mikro kecil dan menengah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pemberdayaan dan pengembangan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan usaha-usaha yang ada di kabupaten Jeneponto dapat bersaing dengan UMKM dari Kabupaten lain, meskipun Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam memberikan kontribusi peningkatan ekonomi di Kabupaten Jeneponto, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam hal produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Jeneponto terkhusus Desa Bulu-Bulo yang diterapkan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jeneponto. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian **Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Bulu-Bulo Kabupaten Jeneponto**

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Bulu-Bulo Kabupaten Jeneponto?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Bulu-Bulo Kabupaten Jeneponto.

4. Tinjauan Teoritik

Peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu dengan secara formal maupun informal. Peran merupakan suatu

aspek dinamis dari status atau kedudukan. Artinya, pada saat seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban serta juga mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah menjalankan sebuah peran.

Menurut Horton dan Hunt (2019), peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya.

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keahlian untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Arundhati Chattopadhyaya dalam Pratama (2018), Pemberdayaan adalah hal yang multi-dimensi dan mengacu pada perluasan kebebasan dalam membuat pilihan dan melakukan tindakan di semua bidang (sosial, ekonomi, dan politik) untuk membentuk kehidupan seseorang.

Pemberdayaan UMKM titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya UMKM yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan UMKM yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan UMKM secara umum.

Sebagaimana proses pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan UMKM juga tidak jauh berbeda dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan UMKM sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat pelaku UMKM agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika agen pengubah, baik yang berasal dari lembaga pemerintahan atau nonpemerintah telah menyelesaikan program pemberdayaan UMKM tersebut, pemberdayaan UMKM sebagai suatu proses dapat terus berlangsung.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Kecil adalah usaha mikro produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Abdurohim, 2021). Sedangkan pengertian usaha menengah menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6, Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 adalah usaha mikro produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Abdurohim, 2021:4).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto, staf/karyawan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM serta tokoh masyarakat Desa Bulu-Bulu sebanyak 10 informan. Sedangkan informan kunci adalah pelaku UMKM Desa Bulu-Bulu sebanyak 20 informan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu (1) observasi, yang meliputi pemantauan terhadap suatu objek penelitian dengan participant observation yaitu observasi yang melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan sehari-hari pada objek yang diamati yang digunakan sebagai sumber data penelitian, (2) Dokumentasi, mencari data yang berupa foto-foto, surat kabar, majalah, agenda, serta data yang berasal dari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian, (3) wawancara, serangkaian pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan secara terbuka atas permasalahan objek yang sedang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data lapangan model Miles dan Huberman dimana aktivitas analisis datanya terdiri atas: (1) Reduksi Data, merangkum hasil data penelitian, memilih hal-hal yang pokok, (2) Penyajian Data dalam bentuk tabel, grafik, phi chart atau pengelompokan jawaban informan atas pertanyaan peneliti dan sejenisnya. (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi atas jawaban informan, (Sugiyono, 2018; Nurdiansyah, et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian berupa peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang didapatkan dari hasil wawancara informan penelitian. Pada bagian ini juga, peneliti menerapkan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yakni teknik analisis *data reduction* dan teknik analisis *data display*. Jawaban dari hasil wawancara informan penelitian dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan dalam bentuk chart yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil wawancara informan penelitian

INDIKATOR	JUMLAH INFORMAN	
	Mendapatka n Pemberdayaa n	TIDAK MENDAPAT KAN PEMBERDA YAAN
BANTUAN PERMODALAN	11	9
PEMBINAAN	-	20
STRATEGI PEMASARAN	-	20
AKSES TEKNOLOGI	-	20
PENGEMBANGAN SDM	3	17
PERIZINAN	16	4
JUMLAH		20

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara informan pendukung, dan dilihat dari tabel 1, maka hasil yang di dapatkan adalah:

- 1) Sebanyak 11 informan yang telah mendapatkan pemberdayaan dan sebanyak 9 orang yang belum mendapatkan pemberdayaan dengan indikator bantuan permodalan dari Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Jeneponto.
- 2) Sebanyak 20 informan yang belum mendapatkan pemberdayaan dengan indikator pembinaan strategi pemasaran dari Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Jeneponto.
- 3) Sebanyak 20 informan yang belum mendapatkan pemberdayaan dengan indikator akses teknologi dari Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Jeneponto.
- 4) Sebanyak 3 informan yang telah mendapatkan pemberdayaan dan sebanyak 17 orang yang belum mendapatkan pemberdayaan dengan indikator pengembangan Sumber Daya Manusia dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jeneponto.
- 5) Sebanyak 16 informan yang telah mendapatkan pemberdayaan dan sebanyak 4 orang yang belum mendapatkan pemberdayaan dengan indikator akses perizinan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jeneponto.

Tabel 2. Hasil wawancara informan penelitian

INDIKATOR	Jumlah Informan	
	Terdapat Pengembangan UMKM	Tidak Terdapat Pengembangan UMKM
Kualitas Produk	5	13
Diversifikasi Produk	6	14
Jumlah Produksi	6	14
Peningkatan Keuntungan	6	14
JUMLAH		20

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara informan pendukung, dan dilihat dari tabel 2, maka hasil yang di dapatkan adalah

- 1) Sebanyak 5 informan yang telah merasakan adanya pengembangan UMKM dan sebanyak 15 informan yang belum merasakan adanya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jeneponto dengan indikator kualitas produk.
- 2) Sebanyak 6 informan yang telah merasakan adanya pengembangan UMKM dan sebanyak 14 informan yang belum merasakan adanya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jeneponto dengan indikator diversifikasi produk.
- 3) Sebanyak 6 informan yang telah merasakan adanya pengembangan UMKM dan sebanyak 14 informan yang belum merasakan adanya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jeneponto dengan indikator peningkatan jumlah produksi.
- 4) Sebanyak 6 informan yang telah merasakan adanya pengembangan UMKM dan sebanyak 14 informan yang belum merasakan adanya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jeneponto dengan indikator peningkatan keuntungan.

2. Faktor-Faktor Yang Di Hadapi Dalam Pengembangan UMKM

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara informan pendukung, hasil yang di dapat adalah sebanyak 15 informan yang menyatakan bahwa faktor internal yang dihadapi adalah permodalan. Selain itu 3 informan menyatakan faktor dukungan ketersediaan SDM, dan 2 informan menyatakan bahwa faktor

yang dihadapi oleh pelaku UMKM Desa Bulu-Bulu adalah faktor lemahnya jaringan dan kemampuan penetrasi pasar.

- 1) Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha UMKM di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal.
- 3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar. Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara informan pendukung, hasil yang di dapat adalah sebanyak 8 informan yang menyatakan bahwa faktor eksternal yang dihadapi adalah sarana dan prasarana. Selain itu 5 informan menyatakan faktor iklim usaha yang belum stabil, 5 informan menyatakan faktor keterbatasan akses pasar, dan 2 informan menyatakan bahwa faktor yang dihadapi oleh pelaku UMKM Desa Bulu-Bulu adalah faktor keterbatasan SDM. .

- 1) Terbatasnya Sarana dan Prasarana. Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
- 2) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif. Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.
- 3) Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

- 4) Keterbatasan SDM-nya. Unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Pembahasan

1. Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional.

Peran pemerintah dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang sangat diperlukan. Karena UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya pemberdayaan dari segi sumber daya manusia sampai pada pengadaan sarana dan prasarana.

Hasil wawancara peneliti di lapangan memperlihatkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan beberapa pemberdayaan diantaranya indikator bantuan permodalan, indikator pengembangan SDM, dan indikator memberikan perizinan. Walaupun dalam pemberdayaan belum menyeluruh dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, namun jika di lihat pada tabel 5 dan gambar 7 yang telah tersaji terdapat 11 informan pendukung yang telah merasakan pemberdayaan dengan indikator permodalan, 3 informan dengan indikator pengembangan SDM, dan 16 informan dengan indikator perizinan. Sedangkan pemberdayaan untuk indikator pembinaan strategi pemasaran dan akses teknologi belum dirasakan oleh pelaku UMKM di Desa Bulu-Bulu, kabupaten Jeneponto.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha tidak semua pelaku usaha yang dapat terjangkau, ada beberapa usaha yang tidak dilakukan penyuluhan kewirausahaan, dikarenakan usaha, mikro kecil dan menengah di Kabupaten Jeneponto ada banyak dan tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, juga karena keterbatasan anggaran dari dinas yang minim. Sementara dalam pemberian pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dalam mendampingi UMKM maupun koperasi, yaitu dengan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan juga pendamping UMKM dalam memberikan informasi serta pelatihan keterampilan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Perkembangan teknologi dan tren wirausaha membuat peran pelaku UMKM semakin penting. UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa, sehingga keberadaan mereka sangat penting. Setiap UMKM yang didirikan merupakan peluang baru bagi orang yang mencari pekerjaan. Tidak seperti perusahaan besar, UMKM cenderung memajang syarat lebih ringan saat mencari tenaga kerja. Hal ini memperluas kesempatan kerja bagi lebih banyak orang sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

No	Kecamatan	Jumlah kel/Des a	Jumlah UMKM			
			2018	2019	2020	2021
1	Binamu	13	4.062	4.216	8772	8.629
2	Turatea	11	1.331	1.489	2..760	4.422

3	Rumbia	12	298	417	672	1.281
4	Kelara	10	1.472	1.554	1103	1.2242
5	Tarawang	8	1.163	1.205	1.231	2.062
6	Batang	6	1.019	1.104	1560	3.803
7	Arungkeke	7	316	372	1.006	2.971
8	Bontoramba	12	581	868	1.816	3.516
9	Tamalatea	12	2.285	2.339	4.213	7.241
10	Bangkala	14	851	1.103	538	4.040
11	Bangkala Barat	8	460	519	293	5.179
JUMLAH		113	13.818	15.186	24.024	45.396

Sumber: koperasi ukm.jenepontokab.go.id/

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa setidaknya terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pelaku UMKM setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan, UMKM juga memberi kesempatan bagi orang-orang yang ingin mendapat uang tambahan tetapi sulit meninggalkan aktivitas harian. Hal ini terlihat dari usaha mikro dan kecil berbasis komunitas, misalnya usaha kerajinan dan kuliner di kalangan ibu rumah tangga.

Sifat UMKM yang fleksibel sekaligus sangat vital membuatnya ideal sebagai pendorong perekonomian saat situasi sulit. UMKM merupakan sektor yang terus berjalan ketika krisis moneter menghantam Indonesia. Saat pandemi COVID19, banyak pengusaha UMKM yang menjual produk yang dibutuhkan masyarakat dengan sistem *online*, mulai dari makanan, masker kain, alat rumah tangga, hingga mainan dan buku. Sistem online melalui media sosial akan terbentuk strategi komunikasi pemasaran yang efektif, calon pembeli dapat memilih jenis produk yang diinginkan dan memperoleh keinginan tersebut dengan cepat tanpa harus keluar rumah, (Ferawati, 2022; Rauf et al., 2021).

2. Faktor-Faktor Yang Di Hadapi Dalam Pengembangan UMKM

Masalah yang masih krusial dihadapi oleh UMKM di antaranya adalah masih rendahnya permodalan. UMKM masih menghadapi kendala dalam menambah permodalan, baik untuk modal kerja maupun modal investasi. Dalam hal ini terdapat keengganan pihak perbankan dalam memberikan kredit kepada UMKM. Untuk membantu permodalan bagi UMKM ini pemerintah telah mewajibkan kepada perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ditujukan untuk memperluas akses kredit Perbankan bagi UMKM yang produktif, layak namun belum *bankable*.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya dan terkadang mereka terjebak dengan keterkaitan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber sumber pembiayaan formal.

Mengenai pemberian akses terhadap sumber sumber pendanaan, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto memberikan akses bagi masyarakat terhadap modal awal. Namun sejatinya, permodalan tersebut diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM belum tersalurkan kepada pelaku UMKM di Desa Bulu-Bulu.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperasi telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan UMKM dengan cukup baik. Penyimpulan tersebut dilandasi hasil penelitian yang mengacu pada enam indikator peran Dinas koperasi dalam pemberdayaan UMKM. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa indikator yang berhasil dijalankan dengan baik diantaranya indikator bantuan permodalan, indikator pengembangan SDM, dan indikator memberikan perizinan.

2. Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor internal yang dihadapi dalam pengembangan UMKM adalah permodalan, faktor dukungan ketersediaan SDM, faktor lemahnya jaringan dan kemampuan penetrasi pasar. Sedangkan faktor eksternal yang dihadapi dalam pengembangan UMKM adalah iklim usaha yang sepenuhnya belum kondusif, keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya akses pasar dan keterbatasan sumber daya manusia.

Referensi :

- Absah, Y., Fawzee, B. K., Qamariah, I., & Muchtar, Y. C. (2016). Strategi Keunggulan Bersaing UMKM. Medan: USU Press.
- BS, dindin Abdurrohman. (2021). Pengembangan UMKM (kebijakan, strategi, digital marketing dan Modal Bisnis UMKM). Bandung: refika aditama.
- Dermanto, & Wardaya, S. (2016). Manajemen Pemasaran Untuk Mahasiswa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Yogyakarta: Deepublish.
- Ferawati, A. (2022). Pengaruh Strategi Promosi terhadap Keputusan Pembelian Chand's Mozzarella Corndog Stick. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 5(1), 2022–2524.
<https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1757>
- Hafiluddin, M. R., Suryadi, & Saleh, C. (2014). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis "Community Based Economic Development" (Studi Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). Universitas Brawijaya.
- Nurdiansyah, N., et.al. (2022). *SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah Asuransi Abstrak*. 5(1), 442–449.
- Rauf, R., Wijaya, H., & Tari, E. (2021). Entrepreneurship education based on environmental insight: Opportunities and challenges in the new normal era. *Cogent Arts and Humanities*, 8(1), 0–15.
<https://doi.org/10.1080/23311983.2021.1945756>
- Sugiyono. (2018). Metode Peneiltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.
- Widaningsih, & Ariyanti. (2018). Aspek Hukum Kewirausahaan. Malang: Polinema Press.
- Wijaya, D. (2018). Akuntansi UMKM. Yogyakarta: Gava Media.
- Yusriadi. (2018). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Deepublish.